



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 122
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017 dan dikeluarkannya Surat penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA.2017 Nomor S-337/MK.7/2017 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Makassar Nomor : PHD-83/RR/PK/2017, yang mengubah rincian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. untuk berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamankan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2017 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 425/2716/DP/IV/2017, tanggal 26 April 2017, perihal Permohonan Perubahan DPA (Parsial) DAK T.A. 2017 ;
 2. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Nomor : 050/279/BPBD/IV/2017, tanggal 25 April 2017, perihal Permohonan DPA Parsial T.A.2017 ;
- sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah terakhir Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 467);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1443);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);

26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 122 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal III

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Mei 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR : 6 Tahun 2017
 TANGGAL : 3 Mei 2017

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

KODE REKENING										URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
												SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	1.01.01	00	00	5						BELANJA DAERAH		971.884.621.000	971.884.621.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	1					Belanja Tidak Langsung		884.375.033.000	884.375.033.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1				Belanja Pegawai		884.375.033.000	884.375.033.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01			Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN		884.375.033.000	884.375.033.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	2					Belanja Langsung		87.509.588.000	87.509.588.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	2	1				Belanja Pegawai		5.713.825.000	5.713.825.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	00	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa		20.987.155.000	22.619.944.750	1.632.789.750	7,78	Bertambah Sebesar Rp. 1.632.789.750,00
1.01	1.01.01	00	00	5	2	3				Belanja Modal		60.808.608.000	59.175.818.250	(1.632.789.750)	(2,69)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.632.789.750,00
1.01	1.01.01	01								Program pelayanan administrasi perkantoran		3.810.895.000	3.810.895.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	02								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.242.260.000	1.242.260.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	03								Program peningkatan disiplin aparatur		251.350.000	251.350.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	04								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1.368.447.000	1.368.447.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	05								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4.528.992.000	4.528.992.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	09								Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar		78.882.000	78.882.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11								Program wajib belajar sembilan tahun		4.685.328.000	4.685.328.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	13								Program pendidikan anak usia dini		2.121.104.000	2.121.104.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	17								Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar		1.965.163.000	1.965.163.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	19								Program manajemen pelayanan pendidikan dasar		450.741.000	450.741.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	21								Program pendidikan non formal		413.002.000	413.002.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23								Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan		66.384.872.000	66.384.872.000	-	-	Tidak Bertambah
1.01	1.01.01	23	08							Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah Dasar (DAK)		3.288.702.000	1.550.825.500	(1.737.876.500)	(52,84)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.737.876.500,00
1.01	1.01.01	23	08	5	2	3				Belanja Modal		3.288.702.000	1.550.825.500	(1.737.876.500)	(52,84)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.737.876.500,00
1.01	1.01.01	23	08	5	2	3	26			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan		3.288.702.000	1.550.825.500	(1.737.876.500)	(52,84)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.737.876.500,00
1.01	1.01.01	23	08	5	2	3	26	08		Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah		3.288.702.000	1.550.825.500	(1.737.876.500)	(52,84)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.737.876.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp:	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	1.01.01	23	09					Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD berikut perabotnya (DAK)	2.540.874.000	1.954.821.000	(586.053.000)	(23,07)	Dikurangi Sebesar Rp. 586.903.000,00
1.01	1.01.01	23	09	5	2	3		Belanja Modal	2.540.874.000	1.954.821.000	(586.053.000)	(23,07)	
1.01	1.01.01	23	09	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.540.874.000	1.954.821.000	(586.053.000)	(23,07)	
1.01	1.01.01	23	09	5	2	3	26 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	2.540.874.000	1.954.821.000	(586.053.000)	(23,07)	Dikurangi Sebesar Rp. 586.903.000,00
1.01	1.01.01	23	10					Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK)	1.221.135.000	3.545.914.500	2.324.779.500	190,38	Bertambah Sebesar Rp. 2.324.779.500,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3		Belanja Modal	1.221.135.000	3.545.914.500	2.324.779.500	190,38	
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.221.135.000	3.545.914.500	2.324.779.500	190,38	
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 01	Belanja modal Pengadaan buku matematika	112.889.000	343.500.000	230.611.000	204,28	Bertambah Sebesar Rp. 230.611.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	106.800.000	325.000.000	218.200.000	204,31	Bertambah Sebesar Rp. 218.200.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	97.000.000	295.200.000	198.200.000	204,33	Bertambah Sebesar Rp. 198.200.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	92.000.000	280.000.000	188.000.000	204,35	Bertambah Sebesar Rp. 188.000.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	53.500.000	162.800.000	109.300.000	204,30	Bertambah Sebesar Rp. 109.300.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	80.000.000	243.400.000	163.400.000	204,25	Bertambah Sebesar Rp. 163.400.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	53.250.000	162.000.000	108.750.000	204,23	Bertambah Sebesar Rp. 108.750.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	123.700.000	376.400.000	252.700.000	204,28	Bertambah Sebesar Rp. 252.700.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	275.650.000	838.500.000	562.850.000	204,19	Bertambah Sebesar Rp. 562.850.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	17.800.000	54.100.000	36.300.000	203,93	Bertambah Sebesar Rp. 36.300.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 26	Belanja modal Pengadaan buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan	99.000.000	301.300.000	202.300.000	204,34	Bertambah Sebesar Rp. 202.300.000,00
1.01	1.01.01	23	10	5	2	3	27 27	Panduan Pendidik	109.546.000	163.714.500	54.168.500	49,45	Bertambah Sebesar Rp. 54.168.500,00
1.01	1.01.01	23	11					Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah Menengah Pertama (DAK)	3.408.329.000	763.339.250	(2.644.989.750)	(77,60)	Dikurangi Sebesar Rp. 2.644.989.750,00
1.01	1.01.01	23	11	5	2	3		Belanja Modal	3.408.329.000	763.339.250	(2.644.989.750)	(77,60)	
1.01	1.01.01	23	11	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.408.329.000	763.339.250	(2.644.989.750)	(77,60)	
1.01	1.01.01	23	11	5	2	3	26 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	3.408.329.000	763.339.250	(2.644.989.750)	(77,60)	Dikurangi Sebesar Rp. 2.644.9

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

KODE REKENING										JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	1.01.01	23	14	5	2	3	12	03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	-	1.431.813.000	1.431.813.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 1.431.813.000,00
1.01	1.01.01	23	14	5	2	3	12	04	Belanja modal Pengadaan printer	42.000.000	-	(42.000.000)	(100,00)	Dikurangi Sebesar Rp. 42.000.000,00
1.01	1.01.01	23	14	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	975.000.000	975.000.000	100,00	
1.01	1.01.01	23	14	5	2	3	16	03	Belanja modal Pengadaan proyektor	-	975.000.000	975.000.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 975.000.000,00
1.01	1.01.01	23	15						Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah	1.111.570.000	1.111.570.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	16						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Swasta beserta perabotnya (DAK)	3.561.773.000	4.424.320.750	862.547.750	24,22	Bertambah Sebesar Rp. 862.547.750,00
1.01	1.01.01	23	16	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.561.773.000	4.424.320.750	862.547.750	24,22	
1.01	1.01.01	23	16	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.561.773.000	4.424.320.750	862.547.750	24,22	
1.01	1.01.01	23	16	5	2	2	23	02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	3.561.773.000	4.424.320.750	862.547.750	24,22	Bertambah Sebesar Rp. 862.547.750,00
1.01	1.01.01	23	17						Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (DAK)	2.039.443.000	990.818.000	(1.048.625.000)	(51,42)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.048.625.000,00
1.01	1.01.01	23	17	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.039.443.000	990.818.000	(1.048.625.000)	(51,42)	
1.01	1.01.01	23	17	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.039.443.000	990.818.000	(1.048.625.000)	(51,42)	
1.01	1.01.01	23	17	5	2	2	23	02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2.039.443.000	990.818.000	(1.048.625.000)	(51,42)	Dikurangi Sebesar Rp. 1.048.625.000,00
1.01	1.01.01	23	18						Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana	189.828.000	189.828.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	43						Pembangunan Lanjutan RKB SD	1.607.831.000	1.607.831.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	48						Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah (Toilet SD dan SMP)	624.023.000	624.023.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	60						Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Swasta	349.430.000	349.430.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	62						Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Swasta beserta perabotnya (DAK)	-	1.818.867.000	1.818.867.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 1.818.867.000,00
1.01	1.01.01	23	62	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	-	1.818.867.000	1.818.867.000	100,00	
1.01	1.01.01	23	62	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	1.818.867.000	1.818.867.000	100,00	
1.01	1.01.01	23	62	5	2	2	23	02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	-	1.818.867.000	1.818.867.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 1.818.867.000,00
1.01	1.01.01	23	98						Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (DID)	26.921.033.000	26.921.033.000	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23	99						Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Sekolah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
JUMLAH BELANJA										971.884.621.000	971.884.621.000	-	-	Tidak Berubah
(DEFISIT)										(971.884.621.000)	(971.884.621.000)	-	-	Tidak Berubah

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
 ORGANISASI : 1.05.03 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING										Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
										SEBELUM, PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05	1.05.03	00	00	5						19.900.976.000	34.900.976.000	15.000.000.000	75,37	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
1.05	1.05.03	00	00	5	1					1.550.976.000	1.550.976.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	00	00	5	1	1				1.550.976.000	1.550.976.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	00	00	5	1	1	01			1.550.976.000	1.550.976.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	00	00	5	2					18.350.000.000	33.350.000.000	15.000.000.000	81,74	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
1.05	1.05.03	00	00	5	2	1				1.860.500.000	1.860.500.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	00	00	5	2	2				10.977.068.500	10.977.068.500	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	00	00	5	2	3				5.512.431.500	20.512.431.500	15.000.000.000	272,11	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
1.05	1.05.03	01								2.585.356.000	2.585.356.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	02								3.021.241.500	3.021.241.500	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	03								54.750.000	54.750.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	04								420.000.000	420.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	05								560.800.000	560.800.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	19								2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	20								6.966.211.500	6.966.211.500	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21								2.741.641.000	17.741.641.000	15.000.000.000	547,12	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
1.05	1.05.03	21	01							253.873.500	253.873.500	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	02							463.221.500	463.221.500	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	03							674.546.000	674.546.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	04							300.000.000	300.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	05							150.000.000	150.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	06							300.000.000	300.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	07							300.000.000	300.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	08							300.000.000	300.000.000	-	-	Tidak Berubah
1.05	1.05.03	21	09							-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
1.05	1.05.03	21	09	5	2	3				-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	
1.05	1.05.03	21	09	5	2	3	23			-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	
1.05	1.05.03	21	09	5	2	3	23	13		-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
										19.900.976.000	34.900.976.000	15.000.000.000	75,37	
										(19.900.976.000)	(34.900.976.000)	(15.000.000.000)	75,37	

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02. - Keuangan
 ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	2.118.255.153.000	2.133.255.153.000	15.000.000.000	0,71	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	56.902.274.000	56.902.274.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.577.645.000	30.577.645.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 3 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	22.826.752.000	22.826.752.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 3 02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	7.471.893.000	7.471.893.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	279.000.000	279.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.324.629.000	26.324.629.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.010.000.000	1.010.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000	273.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	4.891.629.000	4.891.629.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	150.000.000	150.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	1.837.566.879.000	1.837.566.879.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	133.979.559.000	133.979.559.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 1 01	Bagi Hasil Pajak	128.623.570.000	128.623.570.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.355.989.000	5.355.989.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 2	Dana Alokasi Umum	1.324.023.135.000	1.324.023.135.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.324.023.135.000	1.324.023.135.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 3	Dana Alokasi Khusus	379.564.185.000	379.564.185.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 3 01	Dana Alokasi Khusus	101.768.000.000	101.768.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2 3 02	Dana Alokasi Khusus non fisik	277.796.185.000	277.796.185.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	223.785.000.000	238.785.000.000	15.000.000.000	6,70	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
3.02	3.02.01	00	00	4	3 1	Pendapatan Hibah	-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	
3.02	3.02.01	00	00	4	3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	
3.02	3.02.01	00	00	4	3 1 01 01	Pemerintah	-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00
3.02	3.02.01	00	00	4	3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	204.766.000.000	204.766.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	204.766.000.000	204.766.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3 4 01	Dana Penyesuaian	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.520.000.000	11.520.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	11.520.000.000	11.520.000.000	-	-	Tidak Berubah
						JUMLAH PENDAPATAN	2.118.255.153.000	2.133.255.153.000	15.000.000.000	0,71	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02. - Keuangan
ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	5				BELANJA DAERAH	163.686.951.000	163.686.951.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1			Belanja Tidak Langsung	126.592.351.000	126.592.351.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	29.474.708.000	29.474.708.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	29.474.708.000	29.474.708.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	2		Belanja Bunga	800.000.000	800.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	2	01	Bunga Utang Pinjaman	800.000.000	800.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4		Belanja Hibah	70.219.900.000	70.219.900.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	52.177.100.000	52.177.100.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.725.000.000	6.725.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	11.317.800.000	11.317.800.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.097.743.000	1.097.743.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7	05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.097.743.000	1.097.743.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8		Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8	01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2			Belanja Langsung	37.094.600.000	37.094.600.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	1		Belanja Pegawai	9.333.925.000	9.333.925.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	26.532.675.000	26.532.675.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	3		Belanja Modal	1.228.000.000	1.228.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	01						Program pelayanan administrasi perkantoran	3.249.600.000	3.249.600.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.671.000.000	2.671.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	03						Program peningkatan disiplin aparatur	122.000.000	122.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	04						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	375.000.000	375.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	05						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.031.000.000	1.031.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	38						Program anggaran keuangan daerah	7.637.000.000	7.637.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	39						Program penataan aset daerah	10.211.000.000	10.211.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	40						Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah	7.111.000.000	7.111.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	41						Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4.687.000.000	4.687.000.000	-	-	Tidak Berubah
								JUMLAH BELANJA	163.686.951.000	163.686.951.000	-	-	Tidak Berubah
								SURPLUS	1.954.568.202.000	1.969.568.202.000	15.000.000.000	0,77	Bertambah Sebesar Rp. 15.000.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02. - Keuangan
 ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH	422.205.707.000	422.205.707.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	426.205.707.000	426.205.707.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	316.220.394.000	316.220.394.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	01			Pelampauan penerimaan PAD	59.500.000.000	59.500.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	02			Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	102.000.000.000	102.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	03			Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.000.000.000	39.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	04			Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	115.720.394.000	115.720.394.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	6				Penerimaan Piutang Daerah	109.985.313.000	109.985.313.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	6	02			Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	109.985.313.000	109.985.313.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2	3				Pembayaran Pokok Utang	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2	3	01			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Tidak Berubah
										PEMBIAYAAN NETTO	422.205.707.000	422.205.707.000	-	-	Tidak Berubah

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO